



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 120 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Pj.Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Pj.Bupati;

b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :

- a. bab I Pendahuluan;
- b. bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun lalu;
- c. bab III Tujuan dan Sasaran;
- d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan;
- e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

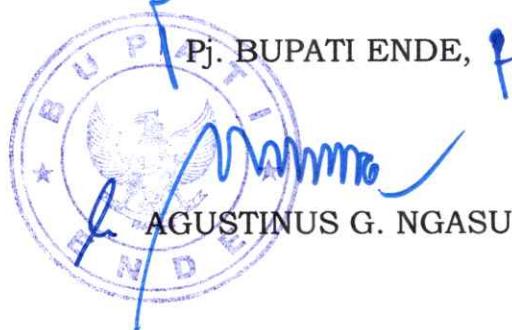
Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun RKA.

Pasal 4

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 128

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karunia-Nyalah maka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Ende Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Ende Tahun 2025 ini memuat visi, misi, tujuan,sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugasdan fungsinya, selanjutnya Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025

Kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Ende Tahun 2025 ini disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten.

Ende, 20 September 2024

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kab. Ende,


EMILIANA ERNI REWA, SE
Pembina Tingkat I
NIP.19690521 199903 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
A.	
DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. ENDE TAHUN 2021	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE	39
3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende	41
3.3.Program dan Kegiatan	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	63
4.1. Rencana Kerja	63
4.2. Pendanaan	64
BAB V. PENUTUP	65

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022..... Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende	9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2022 – 2024.....	20
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi NTT/Kabupaten Ende	25
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas P3A.....	42
Tabel 3.3 Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende	43

C. DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui usaha-usaha pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan bersama sebagai tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, Kehidupan sosial pada saat ini dilandaskan pada kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan makin meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka konsistensi pencapaian tujuan pembangunan, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan, Dokumen perencanaan terdiri dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende adalah Penjabaran dari RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sebagai sarana yang menjembatani kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan dalam bidang pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang meliputi Kualitas Hidup Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan khusus anak, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende ini Odisusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2025.
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Proses penyusunan Renja SKPD bertujuan menghimpun masukan tentang program/kegiatan yang akan di laksanakan dan dimasukkan dalam rencana kerja untuk tahun 2025, Juga untuk mendapatkan gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan dapat menunjang kinerja SKPD, Tahapan Penyusunan Renja SKPD.

1. Mempelajari Visi dan Misi, Kebijakan dan Program prioritas dalam RPJMD dan Renstra.
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
3. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.
4. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju, Dalam kegiatan awal penyusunan ini telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota dengan memperhatikan Rencana Kerja (Renja) Kab/Kota yang telah diakumulasikan dalam usulan program/kegiatan yang ada pada masing-

masing Kabupaten/Kota. Terutama dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak RI, Dengan mempertimbangkan Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai di Tahun 2025, Untuk penetapan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025 dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Tahun 2025.

1.2. DASAR HUKUM

Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu didasarkan pada beberapa landasan secara hirarki yaitu :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Nomenkelatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
10. Peraturan Bupati Ende Nomor 6 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11. Inmendagri No 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
12. Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah

1.3 MAKSD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende adalah agar dapat menyelesaikan permasalahan/hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan Perempuan dan anak serta mendukung upaya mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran yaitu 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Tujuan dari penyusunan Renja SKPD adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende selama 1 tahun anggaran.
2. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah Selama 1 tahun anggaran.
3. Penyusunan Renja SKPD adalah untuk mendeskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende selama 1 tahun anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA,

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra OPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Capaian Kinerja Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tahun 2023 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan, Dari total Anggaran yang dianggarkan **sebesar Rp.1.267.486.352** dan dipergunakan untuk membiayai 6 program dan 11 jenis kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende, Pencapaian target dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende tahun 2023 secara umum untuk keuangan sebesar **1.239.854.515 atau 97,82 %** dari anggaran yang tersedia.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende secara umum memiliki 6 Program dan 11 kegiatan, Terdapat 6 (enam) program yang menunjang pencapaian target kinerja Tahun 2023 dimana 6 (enam) program pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%.

a. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/keluaran Yang Direncanakan.

Program-program penunjang keberhasilan kinerja tersebut antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

b. Realisasi Program/Kegiatan Yang Mencapai Target Kinerja hasil/ Keluaran yang Direncanakan.

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
2. Program perlindungan perempuan
3. Program Pengelolaan sistem data gender dan anak

c. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan Perempuan dan anak dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

- d. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende

	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11 (10/4)
2	08	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2	08	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	33 %
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33 %
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33 %
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPAS - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	66 %
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPAS - KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	33 %

	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11 (10/4)	
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan i khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	6 Laporan	16 %	
	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	8 laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	12 Laporan	50 %	
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang	12 orang	20 Orang	13 orang	-	20 Orang	25 Orang	69 %	
2	08	01	2.02	02	Perlaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan	24 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	-	-	12 Dokumen	20 Dokumen	83 %	
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
2	08	01	2.03	01	Rekonsilasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	3 Laporan	100 %	
					Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan	28 Laporan	9 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	13 Laporan	47	

	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		
	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9
2	23	01	2.03	06	Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	11 (10/4)

2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2	23	01	2.05	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2 Dokumen	33 %	
2	23	01	2.05	02	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	6 Dokumen	100 %
2	23	01	2.05	03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6 Unit	3 Unit	1 Unit	-	1 Unit	4 Unit	60 %	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									

2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	2 paket	1 Paket	-	-	1 paket	3 paket	100 %
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	2 paket	5 paket	-	-	5 paket	7 paket	100 %
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	8 paket	8 paket	4 paket	-	8 paket	20 paket	83 %
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	2 paket	2 paket	2 paket	-	2 paket	6 paket	100 %
2	23	01	2.06	05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	80 %
2	23	01	2.06	06	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	-	12 Laporan	52 Laporan	80 %
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	23	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	1 unit	-	-	1 Unit	3 Unit	50 %
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit	8 unit	4 unit	-	-	4 unit	12 unit	50 %
2	23	01	2.07	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	3 unit	1 unit	-	-	1 unit	1 unit	40 %

2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4 laporan	12 laporan	-	-	12 laporan	16 laporan	31 %
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 laporan	4 laporan	12 Laporan	8 laporan	-	12 laporan	24 laporan	80 %
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 Laporan	-	-	12 laporan	24 laporan	40 %
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	2 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	3 Unit	50 %
2	23	01	2.09	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1 unit	1 Unit	1 unit	-	1 unit	3 unit	100 %

2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan kab/kota	12 dokumen	4 dokumen	1 Dokumen	-	-	1 dokumen	5 dokumen	40 %

2	08	02	2.01	02	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Kab/kota	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	-	-	5 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	51 %
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan bidang	Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi								
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen hasil sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	6 dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	3 dokumen	6 dokumen	100 %
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan perempuan									
2	08	02	2.03	01	Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	30 Orang	15 Orang	15 Orang	-	-	15 Orang	30 Orang	100 %
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
2	08	04	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan Anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan Anak kewenangan kab/kota	20 perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	15 Perangkat daerah	-	-	15 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	100 %
2	08	04	2.01	02	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/kota	15 dokumen	15 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	-	15 dokumen	15 dokumen	33 %

2	08	04	2.02	03	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat Advokasi dan pendampingan	10 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	-	8 Lembaga	16 Lembaga	61 %
2	08	04	2.02	04	Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Sumber daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	15 Orang	15 orang	-	15 Orang	30 Orang	51 %
2	08	04	2.02	05	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	10 Dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	-	6 Dokumen	12 Dokumen	21 %
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak dikewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	15 Dokumen	10 Dokumen	12 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	14 Dokumen	90 %
2	08	05	2,01	02	Penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam dalam kelembagaan Data di kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam dalam kelembagaan Data di kewenangan kabupaten/kota	10 Dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	-	12 Dokumen	24 Dokumen	42 %

2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup	3 Desa	1 desa	-	-	1 desa	2 desa	60 %

2	08	03	2.02	02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi layanan rujukan kewenangan kabupaten/Kota	60 orang	20 orang	20 Orang	-	-	20 orang	40 orang	60 %
2	08	03	2.02	03	Advokasi kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	15 perangkat	5 perangkat	15 perangkat daerah	-	-	5 perangkat	10 perangkat	60 %
2	08	03	2.03	04	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase terlaksananya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	3 Lembaga	1 lembaga	-	-	-	1 lembaga	2 lembaga	60 %
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
2	08	07	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	15 Perangkat	5 Perangkat	15 perangkat	-	-	7 perangkat	12 perangkat	80 %
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap Anak	10 dokumen	2 dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	-	3 dokumen	8 dokumen	80 %
2	08	07	2.02	03	Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan pengaduan	100 orang	30 orang	30 orang	32 orang	-	20 Orang	82 orang	82 %

2	08	07	2.02	04	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelaksanaan pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan Khusus kewenangan kab/kota	Jumlah Layanan Tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus	12 Layanan	12 Layanan	-	-	-	12 layanan	100 %	
2	08	07	2.02	05	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen komunikasi, informasi dan edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	2 dokumen	60 %
2	08	07	2.02	06	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan Khusus kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan Khusus	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	6 dokumen	100 %	
2	08	07	2.03	07	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah kab/kota	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah kab/kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	3 dokumen	100 %
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
2	08	06	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, Non pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan kab/kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, Non pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan kab/kota	20 Organisasi	10 organisasi	10 organisasi	-	-	-	10 dokumen	50 %
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan kabupaten/kota	15 Dokumen	5 Dokumen	12 Dokumen	5 dokumen	-	-	10 dokumen	60 %
2	08	07	2.02	03	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak	30 orang	30 Orang	30 orang	-			30 orang	100 %

					Hidup Anak tingkat Daerah kab/kota	kewenangan kabupaten/kota								
2	08	07	2.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan kabupaten/kota	12 Dokumen	5 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	5 dokumen	41 %
2	08	07	2.02	05	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen komunikasi, informasi dan edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	3 dokumen	9 %
2	08	07	2.02	06	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	20 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	12 dokumen	60 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Untuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan SKPD sedangkan untuk Analisis Kinerja Pelayanan SKPD merujuk pada SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dimana pencapaian target yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa hampir semua target sasaran bisa dicapai dengan maksimal, Keberhasilan pencapaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang baik, restrukturisasi kelembagaan yang efisien, pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif, strategi pemanfaatan SDM yang tepat dan manajemen pengelolaan anggaran yang sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam SPM, capaian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende
Tahun 2022 - 2024

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Th. 2019	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun Ke			Realisasi Capaian pada Tahun Ke		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Ratio KDRT	%	93,33	0,029	0,02	0,019	96,66	0,16	-
2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	100,62	96,97	97,29	96,37	100,41	97,78	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende pada Tahun 2023 sudah tergolong baik, walaupun apabila dilihat berdasarkan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih sangat jauh dari harapan, Tingkat capaian kinerja yang rendah tersebut disebabkan oleh jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Ende sangat besar jumlahnya sedangkan anggaran yang dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende tidak sebanding dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Ende, Namun demikian ketidaktercapaian tersebut pada hakikatnya tidak mengurangi keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Ende pada Tahun 2023 Ketercapaian dan ketidak tercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Ende yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende dalam menyelenggarakan pelayanan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

- a. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Ende khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende masih belum memiliki gedung kantor dan rumah aman untuk melayani permasalahan perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, Hal ini menyebabkan ketidakoptimalan penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Ende.
- b. Penanganan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan atau perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibilities*) masih bersifat parsial tidak terorganisir dengan baik, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.
- c. Jumlah SDM pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende yang kurang memadai.

- d. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Ende yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah permasalahan perempuan dan anak di kabupaten Ende.
- e. Belum ada satupun fasilitas publik yang menyiapkan sarana/prasarana bagi kemudahan untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak,

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kabupaten Ende Tahun 2022-2024, dimana apabila Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende hanya mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Ende tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, lembaga-lembaga Pemerhati permasalahan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Ende, dan lain sebagainya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

- a. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Ende terhadap penanganan permasalahan perempuan dan anak yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai salah satu Misi (Misi ke-5) dari Kabupaten Ende yang merupakan salah satu prioritas daerah.
- b. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Ende terhadap penanggulangan permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Ende yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan perempuan dan anak.
- c. Dukungan dari para *stakeholders* (dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan perempuan dan anak di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.

- d. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari APBD Kabupaten Ende yang terus meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Ende saat ini memang sangat memprihatinkan terutama permasalahan-permasalahan yang sifatnya kasat mata seperti permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini perlu ditindaklanjuti secara komprehensif, dimana mereka sering diabaikan dalam hampir semua sisi pembangunan karena dianggap tidak memiliki kontribusi apapun, padahal perempuan dan anak adalah sesama kaum yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan yang lain.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ende, dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025. Adapun pagu indikatif untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.750.529.500 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)** peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah untuk membiayai program dan kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak (Urusan Non Pelayanan Dasar) dan Penyelenggaraan Administrasi Umum (Non-Urusan).

Apabila melihat usulan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 dan usulan Musrenbang, maka anggaran tersebut cukup memadai, sehingga diharapkan beberapa target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende dapat tercapai sesuai RPD.

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende terkait

pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende pada Tahun 2025.

Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi NTT/Kabupaten Ende**

Nama SKPD : *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak Kab. Ende*

No	Rancangan Awal RKPD / Renstra OPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp, 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp, 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,200,529,500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,200,529,500
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					26,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	DP3A	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP3A	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3A	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3A	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DP3A	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan	DP3A	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	DP3A	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	

	Perubahan DPA-SKPD		koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD			DPA-SKPD		dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD			
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3A	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3A	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,000,000	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3A	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3A	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				990,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				990,000,000	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3A	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bu	988,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3A	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bu	988,000,000	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DP3A	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DP3A	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2,000,000	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20,000,000	
9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP3A	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP3A	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15,000,000	

10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP3A	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP3A	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5,000,000	
	Administrasi Kepegawaian	Perangkat	Daerah		20,000,000	Administrasi Kepegawaian	Perangkat	Daerah		20,000,000	
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana disiplin pegawai	DP3A	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana disiplin pegawai	1 Unit	10,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana disiplin pegawai	DP3A	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana disiplin pegawai	1 Unit	10,000,000	
12	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	DP3A	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	DP3A	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				40,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				40,000,000	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DP3A	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DP3A	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3A	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	5,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3A	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	5,000,000	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DP3A	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	10,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DP3A	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	10,000,000	
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DP3A	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	2,000,000	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	DP3A	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	2,000,000	
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3A	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3A	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1,000,000	

18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3A	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	20,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab,Ende Semua kecamatan, kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	20,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35,000,000	
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	20,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	
20	Pengadaan Mebel	DP3A	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5,000,000	Pengadaan Mebel	DP3A	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5,000,000	

21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3A	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3A	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25,000,000	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21,442,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21,442,000	

24	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	DP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor Kantor yang Disediakan	1 Laporan	558,000	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	DP3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor Kantor yang Disediakan	1 Laporan	558,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44,529,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44,529,500	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Unit	10,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Unit	10,000,000	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DP3A	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	34,529,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	DP3A	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	34,529,500	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				95,000,000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				95,000,000	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				40,000,000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				40,000,000	
27	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ kota	1 dokumen	10,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/kota	1 dokumen	10,000,000	

28	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi kebijakan dan pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 orang	10,000,000	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi kebijakan dan pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 orang	10,000,000	
29	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota	35 Orang	20,000,000	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota	35 Orang	20,000,000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota				55,000,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota					55,000,000
30	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Desa dan Kecamatan di Kab.Ende	Jumlah dokumen hasil Peningkatan Partisipasi perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	35 dokumen	40,000,000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah dokumen hasil Peningkatan Partisipasi perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	35 dokumen	40,000,000	
31	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang , Hukum sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	6 organisasi	15,000,000	Advokasi kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi perempuan dan Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang , Hukum sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	6 Organisasi	15,000,000	

	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				100,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				100,000,000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				80,000,000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				80,000,000	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab.Ende	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	25,000,000	
33	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab.Ende	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	25,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	25,000,000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				50,000,000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				50,000,000	
34	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	21 Orang	25,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	21 Orang	25,000,000	
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab.Ende	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Layanan	25,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Layanan	25,000,000	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50,000,000	
36	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	10,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	10,000,000	
37	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab.Ende	umlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	1 Orang	25,000,000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Spesifik	1 Orang	25,000,000	
38	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	15,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	15,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan		95,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan		95,000,000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50,000,000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50,000,000	
39	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)	3 Perangkat Daerah	10,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)	3 Perangkat Daerah	10,000,000	

			dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
40	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	40,000,000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	40,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				45,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				45,000,000	
41	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 Lembaga	10,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 Lembaga	10,000,000	
42	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	30,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	30,000,000	
43	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	2 Dokumen	5,000,000	

								Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				70,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				70,000,000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70,000,000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70,000,000	
44	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab.Ende	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	1 Dokumen	20,000,000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	1 Dokumen	20,000,000	
45	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab.Ende	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50,000,000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50,000,000	

	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				70,000,000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				70,000,000	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				40,000,000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				40,000,000	
46	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab.Ende	Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	11 Organisasi	3,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	11 Organisasi	30,000,000	

47	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				25,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				25,000,000	
48	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	
49	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	10,000,000	
50	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	1 Dokumen	10,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,000,000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				70,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				70,000,000	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				15,000,000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				15,000,000	
51	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Kebijakan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus	2 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Kebijakan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus	2 Dokumen	5,000,000	

	Kewenangan Kabupaten/Kota		Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Kewenangan Kabupaten/Kota		Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	10,000,000	

	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				35,000,000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				35,000,000	
53	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	10,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	10,000,000	
54	Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan	35 Layanan	25,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan	35 Layanan	25,000,000	
55	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	15,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	15,000,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000	
56	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah Kegiatan kerjasama antar lembaga Penyedia Layanan AMPK	15,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah Kegiatan kerjasama antar lembaga Penyedia Layanan AMPK	15,000,000	
								4 Kegiatan	
57	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab. Ende	Jumlah KIE Perlindungan Khusus	4 Kegiatan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kecamatan di Kab, Ende	Jumlah KIE Perlindungan Khusus Anak	5,000,000	
				12 Dokumen				12 Dokumen	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang, sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2025 tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende terkait rencana pencapaian target RPD Kabupaten Ende dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2024-2026.

Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan permasalahan perempuan dan anak tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende perlu memperhatikan kesesuaianya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende, hal ini menyebabkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari masyarakat untuk Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan nasional terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah sesuai dengan arah Kebijakan Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN tahun 2014–2019 Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” misi yang ke-4 yakni Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Selain itu, kebijakan nasional tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga tertuang dalam Agenda Prioritas Nasional yang dirumuskan menjadi 9 agenda yang disebut NAWA CITA yaitu pada agenda ke-2 (Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya) dengan prioritas agenda meningkatkan peranan dan keterlibatan perempuan dalam politik dan pembangunan serta agenda ke-4 (memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya) dengan prioritas agenda melindungi anak, perempuan dan kelompok marginal.

Arah kebijakan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), Untuk itu rumusan kegiatan di dalam RKPD Tahun 2025 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's terkait kesetaraan gender.
2. Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*) berdasarkan pencapaian SPM.

3. Analisis gender melalui analisis kesenjangan gender dalam *output* kegiatan dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway (GAP)* atau analisis lainnya.
4. Penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG).

Kemudian Rencana Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini diarahkan kepada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Penyediaan cakupan bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan provinsi yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten/kota.
3. Penyediaan sarana pendukung dengan memperhatikan isu-isu strategis sebagai berikut :
 - Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan
 - Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak
 - Adanya kesenjangan gender terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, ekonomi dan politik
 - Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat
 - Masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak.
4. Pembinaan penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan daerah kabupaten/kota diwilayahnya.
5. Pelatihan sumber daya manusia penyedia layanan SPM.
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak.
7. Pembangunan sistem data SPM di daerah.

8. Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
9. Membangun kerjasama antar daerah dan stakeholder dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten/kota.

3.2.Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende

Dengan mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende tahun 2025 – 2026, maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun mendatang (tahun 2025).

Adapun tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende sesuai Renstra 2025 -2026 adalah sebagai berikut :
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sesuai dengan tujuan yang dikemukakan di atas, maka sasaran akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende adalah :

1. Meningkatkan Kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi.
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan.
3. Meningkatnya Pelindungan Perempuan dan perlindungan Anak.
4. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan tujuan dan sasaran di atas, dijabarkan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas P3A

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Meningkatkan Kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	B	B
		2	Meningkatnya perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 %	100 %	100 %
		3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	100 %	100 %	100 %
		4	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kategori KLA	Belum ada peringkat	Pratama (peringkat)	Madya (peringkat)

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2025 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Ende pada Tahun 2025.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk Tahun 2025 dan Prakiraan di Tahun 2026 Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel 3.3 terlampir :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Tolok Ukur	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1,750,529,500		1,928,993,840				
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,200,529,500		1,320,593,840				
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26,000,000		28,600,000				
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Ende, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	5,500,000
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	5,500,000

2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	5,500,000
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	3,300,000
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	5,500,000
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan	100 %	3,300,000

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tahun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah							efisien selama 1 tahun		
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana	Penyelenggaran Administrasi Perkantoran	100 %	5,500,000
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										990,000,000		1,089,000,000
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Org/bln	100 %	988,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	1,086,800,000
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	2,200,000
2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										20,000,000		22,000,000

2 08 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	16,500,000
2 08 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	5,500,000

2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20,000,000				22,000,000	
2 08 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	11,000,000

2 08 01 2.05 02	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	11,000,000
-----------------	---	---	--	--	---	-------	------------	-------	------------	--------------------------------------	---	-------	------------

2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								40,000,000				44,000,000
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	2,00,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	2,200,000
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	5,500,000

2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	11,000,000
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	2,200,000
2 08 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	1,100,000

2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	22,000,000
-----------------	--	---	---	---	---	-------	------------	-------	------------	--------------------------------------	--	--	-------	------------

2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								35,000,000				38,500,000	
2 08 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	22,000,000
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	5,500,000

2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	11,000,000
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							25,000,000					27,442,000
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	3,300,000
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelenggaraan Administrasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	21,442,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	23,580,200

2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	558,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	555,800
-----------------	---------------------------------------	---	--	---	---	-------	-----------	-------	---------	--------------------------------------	--	-------	---------

2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								44,529,500				49,051,840
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	11,000,000
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	34,529,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	38,051,840

2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							95,000,000				108,900,000	
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							40,000,000				44,000,000	
2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Pelaksanaan Kelembagaan yang terlibat aktif dalam PUG	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	100 %	11,000,000
2 08 02 2.01 06	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG Kewenangan kabupaten/kota	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG Kewenangan kabupaten/kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	100 %	11,000,000
2 08 02 2.01 08	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan kabupaten/kota	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase pelaksanaan Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan kabupaten/kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	100 %	22,000,000

2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								55,000,000					64,900,000
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan pendampingan peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik, Hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan dan pendampingan peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik, Hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan pendampingan peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik, Hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Organisasi	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	100 %	16,500,000
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								150,000,000					165,000,000
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000					55,000,000
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,	Ratio KDRT	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Persentase pencegahan Kekerasan	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	100 %	9	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-		Ratio KDRT	100 %	27,500,000

	Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Semua Kelurahan		Dokumen			Dana Alokasi Umum				
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ratio KDRT	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Perangkat Daerah	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ratio KDRT	100 %	27,500,000
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							50,000,000						55,000,000
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ratio KDRT	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Persentase pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi layanan rujukan kewenangan kabupaten /Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Orang	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ratio KDRT	100 %	27,500,000

2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ratio KDRT	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi layanan rujukan kewenangan kabupaten /Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Layanan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ratio KDRT	100 %	27,500,000
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000					55,000,000
2 08 03 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ratio KDRT	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ratio KDRT	100 %	11,000,000
2 08 03 2.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Ratio KDRT	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Persentase terlaksananya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ratio KDRT	100 %	27,500,000

	Kabupaten/Kota		Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	perempuan tingkat daerah kabupaten/kota										
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ratio KDRT	100 %	16,500,000

2 08 04	PRORAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								95,000,000				104,500,000	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000				55,000,000	
2 08 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	100 %	11,000,000

2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	100 %	44,000,000
-----------------	--	--	---	--	---	-------	-----------	-------	------------	--------------------------------------	--	--	-------	------------

2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya								45,000,000					49,500,000
2 08 04 2.02 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Lembaga	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	100 %	11,000,000
2 08 04 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	100 %	33,000,000

	Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga dalam mewujudkan KG dan hakanak										
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 08 04 2.02 03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPAterhadap Korban Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hakanak	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	100 %	5,500,000
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK										70,000,000			77,000,000
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										70,000,000			77,000,000
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Data Gender dan Anak yang tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	Persentase Data Gender Anak	Kab. Ende, Semua	2 Dok	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Data Gender dan Anak	3 Dokumen	22,000,000
2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Data Gender dan Anak yang tersedia	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender Anak	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dok	3 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Data Gender dan Anak yang tersedia	2 Dokumen	55,000,000

08 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								70,000,000				76,000,000	
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								45,000,000				48,500,000	
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak(PHA)	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Percentase Terlaksananya Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Organisasi	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100 %	33,000,000
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak(PHA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Terlaksananya Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100 %	15,500,000

2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								25,000,000				27,500,000	
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak(PHA)	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100 %	5,500,000
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak(PHA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100 %	11,000,000
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak(PHA)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100 %	11,000,000

2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								70,000,000				77,000,000	
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								15,000,000				16,500,000	
2 08 07 2.01 05	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/kota	Cakupan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan kabupaten/kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perlindungan Khusus Anak	100 %	5,500,000
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perlindungan Khusus Anak	100 %	11,000,000
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								35,000,000				38,500,000	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perlindungan Khusus Anak	100 %	11,000,000

2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								20,000,000				22,000,000	
2 08 07 2.03 06	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia Layanan AMPK	Percentase terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kegiatan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perlindungan Khusus Anak	100 %	18,500,000
2 08 07 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perlindungan Khusus Anak	100 %	5,500,000
	TOTAL								1,764,529,500				1,944,393,840	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Perumusan rencana kerja merupakan skenario implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025, yang dimulai dari tahap persiapan , pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

a. Tahap Persiapan (Desember 2023 – Juli 2024)

- Pembentukan Tim Penyusun Renja 2025

Tim penyusun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terbentuk, bekerja sejak Perda Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ditetapkan dibawah inisiasi Dinas induk lama.

- Penyusunan Rancangan awal
- Perumusan Rancangan Renja
- Penetapan Renja 2025
- Setelah penetapan renja akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende sebagai bahan rancangan APBD 2025
- Disiapkan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan
- Persiapan dokumen teknis (optional sesuai jenis kegiatan)
- Persiapan Proses Pengadaan Barang/Jasa

b. Tahapan Pelaksanaan

Secara umum jadwal pelaksanaan dilaksanakan Januari – Desember 2025

c. Tahapan Pengendalian dan Evaluasi

- Setiap bulan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende.

- Pengendalian dan Evaluasi dalam bentuk pelaporan dilakukan secara berkala antara lain melalui laporan bulanan, laporan akhir tahun (pelaporan realisasi keuangan dan pelaporan pencapaian target kinerja).

4.2. Pendanaan

Jumlah total pagu indikatif adalah sebesar Rp. 1.764.529.500 yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026, Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada, Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh aparat maupun masyarakat dalam pelaksanaannya,

Dalam penjabarannya diperlukan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam kaidah pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut :

1. Perlunya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Renja, sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
2. Rencana Kerja selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran,
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, wajib dilakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap bulan kepada Bupati Ende melalui Kepala Bapeda Kabupaten Ende.
4. Pada akhir tahun dilakukan evaluasi menyeluruh dengan mengintegrasikan capaian pelaksanaan Program/Kegiatan dengan target capaian RENSTRA untuk dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja periode perencanaan berikutnya.
5. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten tahun 2025 berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan Pembangunan Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih efisien dalam pencapaian sasaran dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan lebih ditingkatkan secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga kinerja keberhasilan secara operasional dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mendukung keberhasilan perlu dukungan semua pihak dalam hal kerjasama sehingga mempengaruhi keberhasilan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende.

